

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
Jl. Manukwari No. 12B ☎️ (0342) 801590 Satriyan
Kanigoro-Blitar

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2024 Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) OPD ini adalah merupakan penjabaran dari Program-program yang ada di RPJMD 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dalam jangka pendek (1 Tahun), untuk menselaraskan dan mensinkronisasikan rencana kerja OPD 2022 dengan RPJMD 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk mensinkronkan program/kegiatan OPD tahun 2022 dengan RPJMD 2021-2026, sehingga program/kegiatan OPD yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini tidak akan menyimpang dari RPJMD 2021-2026.

Akhirnya Kami berharap semoga Rencana Kerja ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 26 Agustus 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLITAR**

ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700725 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	5
		1.3. Maksud dan Tujuan	8
		1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	11
		2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	12
		2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi OPD	19
		2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	34
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
		3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	61
		3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	61
		3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	63
		3.2. Pendanaan	68
BAB IV	:	PENUTUP	104

LAMPIRAN :

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya di bidang tata lingkungan, di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada visi dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, arah kebijakan dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) OPD periode 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup sesuai dengan isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2021-2026.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perhubungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024;
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan

tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;

4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah dengan empat prioritas yaitu :

1. Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor dan Perluasan Pasar
2. Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta Penguatan Perlindungan Sosial
3. Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema isu-isu strategis RPJMD 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 serta kelanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Perubahan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 96/E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup adalah terciptanya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blitar yang asri, lestari dan berwawasan lingkungan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2024 **“Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar Melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial Politik”**, dengan prioritas pembangunan ketiga **Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana** dan

mendukung misi ke-4 Bupati Blitar yaitu "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan".

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dipakai sebagai pedoman atau acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman menyusun perencanaan
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program
3. Sebagai pedoman penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja PD; proses penyusunan P-Renja PD; keterkaitan antara P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota; serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan P-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja PD.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Menjelaskan secara singkat target kinerja berdasarkan Renstra serta realisasi capaian kinerja yang telah dicapai.
- 2.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD
Mengemukakan isu-isu penting bidang lingkungan hidup terkait program kerja yang direncanakan.
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II dengan mengacu pada APBD Tahun 2024.

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja
 - 3.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
Memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja dalam perubahan RENJA-PD serta strategi pencapaiannya.
 - 3.1.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Memuat indikator dan target kinerja dalam perubahan RENJA-P

3.2. Pendanaan

Berisi uraian penjabaran perubahan rencana kerja dan pendaan Perangkat Daerah yang dirincikan mulai dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama instansi terkait.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi Bupati yang ke empat pada RPJMD 2021-2026 yaitu Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan, kontribusi pencapaian sasaran tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan hidup rata-rata tercapai 100%. Sedangkan berdasarkan rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada 3 (tiga) isu strategis, yaitu :

1. Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
2. Penyediaan sarana dan prasarana daya dukung lingkungan dalam rangka kesiapan bencana dan pencemaran lingkungan;
3. Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja pelayanan OPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke						Realisasi tahun ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,9	65,45	66	66,54	67,09	67,64	65,53	66,80	64,27	-	-	-
2	Indeks Kualitas Air	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6	55	60,53	59,41	-	-	-
3	Indeks Kualitas Udara	86,7	86,8	86,9	87	87,11	87,21	87,46	87,63	82,07	-	-	-
4	Indeks Kualitas Lahan	41,41	43,55	45,69	47,83	49,97	52,11	43,04	39,08	39,70	-	-	-
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	79	80	81	82	83	84	77,21	80,27	84,97	-	-	-
6	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	64,9	65,45	66	66,54	67,09	67,64	65,53	66,80	66	66,54	
2	Indeks Kualitas Air	-	-	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6	61,67	60,53	55,3	55,4	
3	Indeks Kualitas Udara	-	-	86,7	86,8	86,9	87	87,11	87,21	87,46	87,63	86,9	87	
4	Indeks Kualitas Lahan	-	-	41,41	43,55	45,69	47,83	49,97	52,11	39,10	39,08	45,69	47,83	
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	79	80	81	82	83	84	77,21	80,27	81	82	
6	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2, pada Tahun 2023, Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu indikator sasaran RPJMD Kabupaten Blitar yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak mencapai target yang telah ditentukan, dari target 66 tercapai sebesar 64,27 (kategori SEDANG). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana ketiga indikator ini menjadi indikator sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup, dengan tingkat capaian ketiga indikator sebagai berikut :

1. 1 (satu) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Air memperoleh capaian kinerja di atas dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Air dari target 55,3 tercapai 59,41, atau tercapai prosentasi sekitar 107,43%.
2. 2 (dua) parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan memperoleh capaian kinerja di bawah target yang telah ditentukan. Indeks Kualitas Udara dari target 86,91 hanya tercapai 82,07 atau sekitar 94,43% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan capaian kinerjanya dari target 45,69 capaian kinerjanya adalah 39,70 atau tercapai prosentasenya sekitar 86,89%.

Berikut ini analisa penyebab ketidaktercapaian indikator dan rumusan rencana tindak lanjut rekomendasi tiap unsur dari IKLH :

1. Indeks Kualitas Air

Nilai IKA Kabupaten Blitar adalah 59.41 kategori SEDANG lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKA Provinsi Jawa Timur yaitu 55.86. Kabupaten Blitar peringkat Nasional 68 dari 514 Kabupaten/Kota sedangkan peringkat Provinsi 11 dari 38 Kabupaten/Kota.

Titik pantau IKA : Pusat 5 titik pantau 3 kali periode sampling Juli, September, November 2023; Provinsi 3 titik pantau sungai dengan 2 kali periode sampling dan APBD 16 titik pantau 2 kali periode

sampling. Untuk APBD terdiri dari 15 titik pantau sungai yang meliputi hulu, tengah, dan hilir, serta 1 waduk nyunzur.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai IKA di Kabupaten Blitar dari tahun sebelumnya sebanyak 1,12. Penurunan nilai IKA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Penambahan titik pantau air sungai yang sebelumnya hanya 3 lokasi pada kawasan hulu dan hilir (12 data) pada Tahun 2023 menjadi 5 lokasi sungai kawasan hulu, tengah, hilir (30 data). Dengan bertambahnya titik lokasi uji diharapkan hasil yang didapat akan lebih merepresentasikan kualitas sungai di Kabupaten Blitar;
- b. Bertambahnya kegiatan usaha peternakan terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran Fecal Coli;
- c. Cemaran limbah domestik dari permukiman warga yang berpengaruh signifikan terhadap tingginya parameter Total Phospat;
- d. Musim kemarau berkepanjangan selama akhir tahun 2023 menyebabkan debit sungai yang berkurang sangat drastis sehingga berimbas pada naiknya temperature air dan beberapa parameter pencemar lainnya karena kurangnya daya dukung dan daya tampung sungai.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air yaitu :

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik.

- d. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan,penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai IKU Kabupaten Blitar adalah 82.07 kategori BAIK. Kabupaten Blitar peringkat Nasional 400 dari 514 Kabupaten/Kota sedangkan Provinsi 30 dari 38 Kabupaten/Kota. Titik Pantau IKU : Pusat (APBN) terdiri dari 4 titik pantau dengan 2 kali periode sampling dan Daerah (APBD) terdiri dari 4 titik pantau dengan 2 kali periode sampling. Masing-masing titik pantau pada pengujian yang dilakukan oleh Pusat maupun Daerah didasarkan pada 4 kategori lokasi, antara lain: Perkantoran, Permukiman, Industri, dan Transportasi.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai IKU di Kabupaten blitar dari tahun sebelumnya sebanyak 5,56. Tahun 2023 nilai IKU tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a. Perubahan lokasi titik pantau udara APBN KLHK

Pada tahun 2023 dilakukan perubahan titik pantau udara di tiga lokasi yaitu kategori industri yang sebelumnya berada di Kantor Kecamatan Sutojayan berubah menjadi Kantor Desa Rejoso dengan pertimbangan keberadaan pabrik gula PT. RMI yang mewakili kawasan industri. Lokasi kedua yaitu kategori Permukiman yang sebelumnya berada di Kantor Kelurahan Kanigoro digeser ke Perumahan Kendalrejo Talun dengan pertimbangan bahwa lokasi lama berada di jalan utama yang terpengaruh oleh kegiatan transportasi. Sedangkan lokasi ketiga yang mengalami perubahan adalah kategori perkantoran yang sebelumnya berada di Kantor BPBD saat ini bergeser ke kawasan perkantoran DLH, BPN, dan Dispendukcapil dengan pertimbangan

bahwa titik penempatan tiang sampler di kawasan sebelumnya berada di dekat jalan raya sehingga rawan pengaruh kegiatan transportasi.

b. Penambahan titik pantau udara dari ABPD Kabupaten Blitar

Pada Tahun 2022 hanya memiliki 4 lokasi titik pantau yang didanai oleh APBN sedangkan tahun 2023 titik pantau bertambah menjadi 8 dengan dukungan dana APBD. Penambahan titik pantau tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan atas kualitas udara di Kabupaten Blitar.

c. Letak tiang sampler yang terlalu dekat dengan sumber emisi

Berdasarkan Permenlhk No 27 Tahun 2021 Jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit adalah 20 (dua puluh) meter. Oleh sebab itu akan dievaluasi ulang terkait jarak alat pantau dan sumber emisi dengan mempertimbangkan segi keamanan alat dan kelancaran proses pengambilan sampel

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara yaitu :

- a. Kolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk kegiatan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala dan kewajiban uji emisi bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan uji KIR
- b. Melakukan aksi Gerakan Blitar Menanam (GBM) di area titik pantau kualitas udara

3. Indeks Kualitas Lahan

Nilai IKL Kabupaten Blitar adalah 39.70 kategori KURANG. Kabupaten Blitar peringkat Nasional 321 dari 514 Kabupaten/Kota sedangkan Provinsi 23 dari 38 Kabupaten/Kota. Data IKL yang diinput pada aplikasi meliputi RTH 17 titik (Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, Median Jalan, Sempadan Sungai), tutupan vegetasi 19 titik (Hutan Rakyat, Taman Lingkungan, Pekarangan dan Pepohonan Lainnya yang relevan).

Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian IKL antara lain :

- a. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Blitar,
- b. Luasnya lahan kritis di Kabupaten Blitar yang disebabkan oleh kekeringan akibat musim kemarau dampak pemanasan global, dan
- c. Alih fungsi lahan menyebabkan tidak adanya penambahan yang signifikan terhadap luasan tutupan lahan di Kabupaten Blitar

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lahan yaitu :

- a. Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui Inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- b. Koordinasi dengan instansi lain seperti Perhutani, CDK, Perkebunan untuk data luas tanam

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

i. Analisa SWOT

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

a. Kekuatan

- 1) Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana;
- 2) Adanya dukungan teknologi informasi;
- 3) Adanya Kelembagaan setingkat Dinas yang membidangi lingkungan hidup;
- 4) Tersedianya peralatan dan teknologi informasi;

- 5) Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 6) Tersedianya laboratorium lingkungan hidup;
- 7) Tersedianya aparatur sipil Negara.

b. Kelemahan

- 1) Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup;
- 2) Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup;
- 3) Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten;
- 4) Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup;
- 5) Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP;
- 6) Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

c. Peluang

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup;
- 3) Berkembangnya teknologi ramah lingkungan;
- 4) Adanya konvensi internasional dalam pengelolaan lingkungan;
- 5) Adanya kerjasama antara pesatren binaan Lingkungan hidup dengan organisasi-organisasi masyarakat yakni Karang taruna, PKK;
- 6) terciptanya ruang komunikasi antara OPD dengan masyarakat sasaran melalui online, chat, dst.

d. Tantangan

- 1) Terjadinya perubahan iklim;
- 2) Penurunan tutupan lahan dan hutan;

- 3) Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4) Meningkatnya volume sampah dan limbah;
- 5) Meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah :
 - a) Belum terkelolanya dengan baik limbah dan sampah yang dihasilkan oleh dunia usaha maupun domestik;
 - b) Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menyebabkan berkurangnya tutupan lahan dan hutan sekaligus konsumsi sumber daya tersebut menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama teradinya perubahan iklim.
2. Belum lengkapnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya, adapun hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Masih kurangnya dan masih lemahnya dokumen lingkungan yang disusun;
 - b) Masih lemahnya upaya pengendalian dan pengawasan serta upaya penegakan hukum.
3. Terbatasnya Ruang Publik berupa taman Kota, hutan Kota dan RTH di perkotaan.
Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Terbatasnya alokasi dana/anggaran;

- b) Kesulitan mencari lokasi untuk dibangun taman kota/RTH.
- 4. Belum tersedianya data dan Informasi lingkungan yang akurat dan mudah diakses masyarakat
Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Kurang optimalnya fasilitas IT yang ada;
 - b) Kurangnya jumlah aparatur.
- 5. Belum terwujudnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan
Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Kurangnya jumlah sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- 6. Kurang optimalnya Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
Adapun permasalahan ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Belum tersosialisasinya prosedur layanan dengan baik;
 - b) Proses pelayanan yang masih dilakukan secara fisik dan manual;
 - c) Belum tersedianya laboratorium lingkungan di Kabupaten Blitar.

iii. Dampak Terhadap Capaian Program Nasional (NSPK) dan internasional (SDGs)

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Lingkungan Hidup diatur berdasarkan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pencapaian visi misi kepala daerah melalui kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah mendukung capaian NSPK, yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**RPPLH**) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Acuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang RPPLH :

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. SE Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tahapan Penyusunan RPLH berdasarkan SE Menlhk adalah :

- a. Inventarisasi Lingkungan Hidup
- b. Pengolahan data dan Informasi Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup
- c. Analisis Data dan informasi untuk Menyepakati Isu Pokok
- d. Penentuan Target untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kurun Waktu 30 tahun
- e. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kurun Waktu 30 tahun

RPPLH Kabupaten Blitar baru pada Tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup dengan mencukupi dan mengumpulkan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Blitar Dalam Angka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Data dan Informasi Kehutanan yang telah ditetapkan dengan Perbup Blitar No. 41/2016 tentang Rencana Kehutanan Tk. Kabupaten Blitar Tahun 2015-2035 serta penyusunan dokumen daya tampung dan daya dukung lingkungan pada APBD Perubahan TA 2019.

Kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan RPPLH:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,

- Air, Udara dan Laut untuk penyusunan Data Indeks Kualitas Lingkungan melalui data uji kualitas air dan udara;
- d. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah untuk penyusunan IKPLHD;
 - e. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dasar penyusunan KLHS :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang KLHS Dalam Penyusunan RPJMD
- c. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/417/409.06/KPTS/2018 Tentang Pembentukan kelompok Kerja Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2018

KLHS menjadi syarat penyusunan RTRW dan RDTRK sehingga di setiap Kecamatan perlu disusun KLHS mengikuti RDTRK. KLHS yang telah disusun, yaitu :

- a. Tahun 2017 : Kec. Kanigoro dan Kec. Sutojayan;
- b. Tahun 2018 : Kec. Srengat, Kec. Wlingi, Kec. Nglegok dan Kec. Garum
- c. Tahun 2020 : Kec. Talun, Review RTRW, RPJMD 2021-2025
- d. Tahun 2021 : KLHS RTRW

- e. Tahun 2022 : Kec. Grum, Kec. Srengat, Kec. Wlingi
- f. Tahun 2023 : KLHS RPJPD
- g. Tahun 2024 : KLHS RPJMD

Kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan KLHS, yaitu:

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
 - Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas lingkungan Hidup, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dengan rincian kegiatan :
 - a. Gerakan Terpadu Kali Bersih yang ditetapkan melalui Perbup Blitar No. 353/2017
 - b. Patroli Sungai
 4. Pengelolaan Kehati Kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan dasar Keputusan Bupati blitar No. 188/388/409.06/KPTS/2017 Tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Desa Sumberagung Kec. Panggungrejo, Kab. Blitar
 5. Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam1 (satu) daerah Kab/Kota
Setiap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan wajib menyusun Dokumen lingkungan berdasarkan :
 - a. Perbup Blitar No. 73/2016 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan & Penilaian Dokumen Lingkungan
 - b. Perbup Blitar No. 41/2018 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Blitar

Rekomendasi terkait penyimpanan limbah B3 (TPS B3) dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Di kabupaten Blitar hanya sebagai TPS Limbah B3 yang ada di Rumah Sakit, untuk pengolahan Limbah B3 dikirim ke perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan Limbah B3 di luar Blitar.

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Blitar
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan menindaklanjuti laporan/pengaduan dari masyarakat terhadap pencemaran lingkungan

Pengawasan ini dilakukan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan Rekomendasi Surat Pengelolaan Lingkungan atau Dokumen UKL-UPL / AMDAL.

7. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota
8. Peningkatan Kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di didaerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara spesifik yang melibatkan MHA belum ada, yang telah dilaksanakan hanya kegiatan penghijauan di kawasan hutan dan pembinaan dengan

melibatkan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah/kota
Kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat, yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan berupa sosialisasi dan pembinaan Sekolah Adiwiyata, Kelurahan/desa Berseri dan Pondok Pesantren Berseri (Ecopesantren)
 - b. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dengan kegiatan sosialisasi Desa Proklim untuk mendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan Perbup Blitar No. 38/2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Blitar.
 - c. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan membentuk Saka Kalpataru Pramuka Kwardcab Blitar yang dibentuk berdasarkan SK Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Blitar nomor : 43 tahun 2018 tentang Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Kalpataru Kwartir Cabang Blitar Masa bakti Tahun 2018-2023 dan SK Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Blitar nomor : 44 tahun 2018 Pimpinan Satuan Karya Pramuka Kalpataru Kwartir Cabang Blitar Masa bakti Tahun 2018-2023
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada Bank Sampah di masyarakat
10. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota melalui kegiatan (ganti Sub Kegiatan SIPD):

- a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan penghargaan lomba Sekolah Adiwiyata, Desa/Kelurahan BERSERI, Bank Sampah, Eco Office, dan Kalpataru Kabupaten.
11. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH terhadap :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota

Permasalahan yang dihadapi dalam menangani pengaduan masyarakat adalah belum adanya Perbup yang mengatur tentang jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL/UPL serta belum adanya data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan di Kab. Blitar sehingga menghambat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup

Penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan melakukan tinjau lokasi pengaduan dan fasilitasi sengketa lingkungan serta uji kualitas sumber pencemar.

12. Pengelolaan sampah
 - a. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan wajib memiliki izin lingkungan yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas lingkungan Hidup melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sedangkan untuk pengangkutan sampah dan

- pemrosesan akhir sampah dilakukan MOU antara swasta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui Kegiatan fasilitasi Penanganan Kebersihan dan Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah dengan dasar Perbup blitar Nomor 23/2018 tentang Perubahan Atas Perbup blitar Nomor 48 tahun 2013 tentang tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta dilakukan dengan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengolahan sampah melalui Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan dasar Perda Kab. Blitar No. 10/2011 tentang Pengelolaan Sampah serta Perbup Blitar No. 39/2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik.

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*.

Jika sebelumnya MDGs memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Pencapaian visi misi kepala daerah melalui kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah mendukung capaian SDGs, yaitu :

1. Tujuan SDG's kedua : Tanpa Kelaparan, dengan indikator SDG's:

- a. Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan diampu oleh Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Presentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik diampu oleh Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Tujuan SDG's kedelapan : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator SDG's Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) yang diampu oleh Sub Kegiatan :
- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - c. Pelaksanaan Rehabilitasi
 - d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Tujuan SDG's kesebelas : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, dengan indikator SDG's :
- a. Persentase sampah yg dikelola, yang diampu oleh Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan indikator Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah, Sub Kegiatan Penanganan

- sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.
- b. Indeks Kualitas Udara, yang diampu oleh Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran, dan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Tujuan SDG's duabelas : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dengan indikator SDGs :
- a. Persentase limbah B3 yang dikelola, yang diampu oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - b. Persentase sampah yg dikelola, yang diampu oleh Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan indikator Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,

Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, dengan indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah, dengan indikator Persentase luas layanan pengumpulan sampah, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional dengan indikator jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

5. Tujuan SDG's kelimabelas : Ekosistem Daratan, dengan indikator SDGs :
 - a. Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yang masuk yang diampu oleh Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Koordinasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan yang diampu oleh Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - c. Penyusunan Dokumen IPKLHD yang diampu oleh Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

- Tujuan SDG's keenambelas : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh, dengan indikator SDGs Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah yang diampu oleh Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Isu – isu strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu strategis pemerintahan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup;
2. Terjadinya perubahan iklim;
3. Penurunan tutupan lahan dan hutan;
4. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. Meningkatnya volume sampah dan limbah;
6. Meningkatnya emisi gas rumah kaca;
7. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
8. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten;
9. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Peluangnya :

1. Adanya kerjasama antara pesantren binaan Lingkungan hidup dengan organisasi-organisasi masyarakat yakni Karang taruna, PKK, dan strs;
2. terciptanya ruang komunikasi antara OPD dengan masyarakat sasaran melalui online, chat, dst.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra OPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3 terlampir.

Tabel 2.3.
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
Periode Pelaksanaan 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	31,046,572,091	100	5,190,948,656	80	10,615,742,629	0	0	0	0					0	0	0	0	100	5190948656	100	16.71987697	5190948656	DLH
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	25	212,204,000	4	11,054,160	4	4,146,294	3	0	3	0					6	0	150	0	10	11054160	40	5.209213775	11054160	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	177,033,000	2	6,117,440	2	1,914,084	0	0	0	0					0	0	0	0	2	6117440	15.38461538	3.45538	6117440	DLH
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	35,171,000	5	4,936,720	5	2,232,210	3	0	3	0					6	0	120	0	11	4936720	36.666667	14.03633675	4936720	DLH
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	96	27,220,533,195	16	4,067,241,738	16	4,762,758,552	0	827,171,893	16	1,365,644,690					16	2192816583	100	46.0408933	32	6260058321	33.333333	22.99755951	6260058321	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	41	26,658,606,695	41	4,039,206,738	40	4,732,163,907	37	826,769,553	37	1,360,304,690					74	2187074243	185	46.21721238	115	6226280981	28.04878049	23.35561289	6226280981	DLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	72	488,835,000	12	26,640,000	12	21,360,000	0	0	0	5,340,000					0	5340000	0	25	12	31980000	16.666667	6.542084753	31980000	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15				
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14				
		Kuangan SKPD	SKPD																									
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	24	73,091,500	4	1,395,000	4	9,234,645	0	402,340	0	0					0	402340	0	4.356853999	4	1797340	16.666667	2.459027383	1797340	DLH	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41	1,650,000,000	0	-	40	120,000,000	0	0	0	0															DLH
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	41	1,650,000,000	0	-	40	120,000,000	0	0	0	0															DLH
		Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah waktu pelaksana	72	696,844,900	12	287,902,	12	319,766,711	3	69,360,824	3	123,826,053					6	193186877	50	60.41494326	18	481089037	25	69.03818009	481089037	DLH	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15					
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp		
		Perangkat Daerah	an administrasi umum yang akuntabel				160																						
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	17,908,000	1	5,955,800	1	2,155,953	0	0	1	2,153,430							1	2153430	100	99.88297519	2	8109230	33.333333	45.2827281	8109230	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	188,537,900	1	49,217,793	1	67,632,744	0	0	2	20,782,433							2	20782433	200	30.72835992	3	70000226	50	37.12793343	70000226	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	119,920,000	1	17,894,600	1	36,560,514	1	19,510,000	1	138,000							2	19648000	200	53.74103876	3	37542600	50	31.30637091	37542600	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	10,500,000	12	2,020,000	12	1,500,000	3	510,000	3	510,000					6	1020000	50	68	18	3040000	25	28.95238095	3040000	DLH
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	359,979,000	100	145,072,467	100	211,917,500	6	49,340,824	15	100,242,190					21	149583014	21	70.58549388	121	294655481	20.16666667	81.85351951	294655481	DLH
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	107,132,000	4	77,425,000	4	874,081,821	1	7,400,000	0	0					1	7400000	25	0.846602666	5	84825000	20.83333333	79.17802337	84825000	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	107,132,000	32	77,425,000	10	874,081,821	1	7,400,000	0	0					1	7400000	10	0.846602666	33	84825000	55	79.17802337	84825000	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	2,107,758,996	12	532,456,963	12	3,038,149,986	3	748,141,749	3	749,988,537					6	1498130286	50	49.31060984	18	2030587249	25	96.33868259	2030587249	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	115,080,000	12	12,660,000	12	16,663,125	3	6,400,000	1	3,420,000					4	9820000	33.333333	58.93252316	16	22480000	22.222222	19.53423705	22480000	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	536,500,196	12	96,404,753	12	119,655,282	3	22,052,654	3	21,138,542					6	43191196	50	36.09635553	18	139595949	25	26.01973868	139595949	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	88,178,800	9	14,677,750	12	9,056,379	0	0	1	5,740,900					1	5740900	8.333333	63.39067744	10	20418650	13.888889	23.15596266	20418650	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15=(14/5)*100 (Ki & Kr) Rp= 14			
								Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1,368,000,000	12	408,714,460	12	2,892,775,200	3	719,689,095	3	719,689,095					6	1439378190	50	49.75769254	18	1848092650	25	135.094492	1848092650	DLH
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	702,099,000	12	214,868,635	12	1,496,839,265	3	403,183,424	3	317,477,120					6	720660544	50	48.14548635	18	935529179	25	133.2474735	935529179	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	673,875,000	64	166,991,196	64	1,446,842,465	15	403,183,424	12	317,477,120					27	720660544	42.1875	49.80919218	91	887651740	14.21875	131.7235006	887651740	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	28,224,000	1	47,877,439	1	49,996,800	0	0	0	0					0	0	0	0	1	47877439	100	169.6337833	47877439	DLH
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	30%	1,821,765,500	5%	159,645,200	5%	300,000,000	0%	9,015,000	0	0					0	9015000	0	3.005	0.05	168660200	16.666667	9.258063126	168660200	DLH
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	36%	1,821,765,500	6%	159,645,200	6%	300,000,000	0%	9,015,000	0	0					0	9015000	0	3.005	0.06	168660200	16.666667	9.258063126	168660200	DLH
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Kabupaten/RPJPD/RPJM	Jumlah Dokumen KLHS Rencana tata Ruang Kabupaten/ Kota yang	6	1,821,765,500	1	159,645,200	1	300,000,000	0	9,015,000	0	0					0	9015000	0	3.005	1	168660200	16.666667	9.258063126	168660200	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
		D	Disusun																								
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	60%	11,218,455,342	10	2,313,027,856	10%	10,259,364,773	0%	3,628,360	3%	48,198,360					0.03	51826720	30	0.505164999	10.03	2364854576	1671.666667	21.08003735	2364854576	DLH
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30%	2,734,484,500	5	125,858,280	5%	162,173,472	0%	6,668,360	3%	18,795,561					0.03	25463921	60	15.70165619	5.03	151322201	1676.666667	5.533847458	151322201	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	210	1,309,340,000	38	84,028,525	35	95,000,000	0	3,628,360	20	46,050,360					20	49678720	57.14285714	52.29338947	58	133707245	27.61904762	10.2118048	133707245	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	36	1,425,144,500	1	41,829,755	1	16,100,000	0	0	1%	2,148,000					0.01	2148000	1	13.34161491	1.01	43977755	2.80555556	3.08584533	43977755	DLH
		Sub Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup	1	51,073,472	0	-	1	51,073,472	0	3,040,000	1%	16,647,561					0.01	19687561	1	38.54752816	0.01	19687561	1	38.54752816	19687561	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15=(14/5)*100 (Ki & Kr) Rp= 14			
1	2	3	4	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp	16		
		Lingkungan Hidup Daerah	Daerah yang Disusun																								
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30%	1,323,173,500	5.2	218,050,883	5%	70,325,115	59	0	59	1,215,000					59	1215000	118000	1.727690029	59.209722	219265883	19736.57407	16.57121179	219265883	DLH
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	300	1,323,173,500	198	218,050,883	50	70,325,115	59	0	59	1,215,000					59	1215000	118	1.727690029	257	219265883	85.666667	16.57121179	219265883	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
								Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp			
		<i>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	90%	7,160,797,342	15	1,969,118,693	15%	10,026,866,186	10%	66,932,050	1	98,687,646					1.1	165619696	7333333	1.651759313	16.1	2134738389	1788889	29.81146215	2134738389	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	18	901,517,000	3	767,111,208	3	383,353,426	1	2,960,000	1	3,483,000					2	6443000	6666667	1.680694514	5	773554208	2777778	85.80583705	773554208	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi	250	6,259,280,342	1	1,202,007,485	10	9,643,512,760	1	63,972,050	1	95,204,646					2	159176696	20	1.650609067	3	1361184181	1.2	21.74665627	1361184181	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	20%	44,145,804,476	0.05	1,605,716,244	12%	459,543,226	25%	302,056,000	25%	3,000,000					0.5	305056000	416.66667	66.38243863	0.5034722	1910772244	251.7361111	4.328321268	1910772244	DLH
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	6000	44,145,804,476		1,605,716,244	1000	459,543,226	397	302,056,000	397	3,000,000					794	305056000	79.4	66.38243863	794	1910772244	13.233333	4.328321268	1910772244	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12	44,145,804,476	4.737	1,605,716,244	1,588	459,543,226	397	302,056,000	397	3,000,000					794	305056000	50	66.38243863	5531	1910772244	46091.66667	4.328321268	1910772244	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13			14		15		
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)			13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	20%	10,895,931,423	1	19,868,000	2%	24,000,000	10	0	2	10,710,000					10	10710000	50000	44.625	11	30578000	5500	0.280636862	30578000	DLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang tertangani	6000	10,895,931,423	47	19,868,000	48	24,000,000	10	0	2	10,710,000					10	10710000	20.833333	44.625	57	30578000	0.95	0.280636862	30578000	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Fasilitasi Persetujuan /Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	12	10,895,931,423	28	19,868,000	20	24,000,000	10	0	2	10,710,000					10	10710000	50	44.625	38	30578000	31.666667	0.280636862	30578000	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
1	2	3	4	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp	16		
		Elektronik	Elektronik																								
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	85%	1,635,221,000	63	323,280,761	75%	78,430,615	4%	6,767,300	10%	8,739,317					0.14	15506617	18.666667	19.77112764	63.14	338787378	74.28235294	20.71814012	338787378	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
								Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp			
		<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase Kegiatan/usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik</i>	85%	1,635,221,000	63	323,280,761	75%	78,430,615	4%	6,767,300	10%	8,739,317					0.14	15506617	18.666667	19.77112764	63.14	338787378	74.285294	20.7012	338787378	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7500	917,621,000	573	147,992,187	250	17,000,000	130	3,447,300	112	2,650,000					130	6097300	52	35.86647059	703	154089487	9.373333	16.79227993	154089487	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	600	717,600,000	134	175,288,574	100	61,430,615	22	3,320,000		6,089,317														DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	60%	3,682,751,000	10%	2,589,808,952	10%	1,390,229,445	10	210,294,930	10	0														DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	42	1,198,470,000	43	323,230,808	42	490,000,000	42	6,911,800	42	104,299,500					84	111211300	200	22.69618367	127	434442108	302.3809524	36.2497274	434442108	DLH
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	24	1,934,281,000	4	1,885,964,049	4	668,000,000	4	6,033,230	4	7,523,000					8	13556230	200	2.029375749	12	1899520279	50	98.20291256	1899520279	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp
		Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	9600	550,000,000	3305	380,614,095	2400	232,229,445	2400	197,349,900	2400	9,072,500					4800	206422400	200	88.88726406	8105	587036495	84.42708333	106.7339082	587036495	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	30%	1,700,000,000	3.03	9,159,750	5%	12,678,932	0	0	0	0					0	0	0	0	0.1270833	9159750	42.361111	0.53880824	9159750	DLH
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan	30%	1,700,000,000	2	9,159,750	5	12,678,932	0	0	0	0					0	0	0	0	2	9159750	66.666667	0.53880824	9159750	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15					
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr	Rp		
		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Dunia Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30	1,700,000,000	3	9,159,750	5	12,678,932	0	0	0	0							0	0	0	0	3	9159750	10	0.538808824	9159750	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	75%	250,781,000	100%	24,805,000	65%	25,250,000	15%	640,000	20%	3,085,000							0.35	3725000	53.84615385	14.75247525	1.35	2853000	180	11.37645994	28530000	DLH
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang	100%	250,781,000	100%	24,805,000	100%	25,250,000	20%	640,000	15%	3,085,000							0.35	3725000	35	14.75247525	1.35	2853000	135	11.37645994	28530000	DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				7		6		8		9		10		11		12		13		14		15				
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki		Kr
		Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	ditindaklanjuti																							
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	120	250,781,000	16	24,805,000	20	25,250,000	4	640,000	3	3,085,000													
3	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	84%	27,511,563,750	84.97	7,666,090,247	82%	655,388,047	20%	142,641,298	20%	23,446,106													DLH
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	40%	27,511,563,750	39.06	7,666,090,247	38.50%	655,388,047	8.5%	142,641,298	8.5%	23,446,106													DLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
								Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp			
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-an	Jumlah Sampah yang Tertangani melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-an	358500	14,832,228,100	### ### #	3,452,841,559	10	74,997,748			0	0														
								0.27	2,050,000							0	2050000	0	2.733415409	57567.58	3454891559	16.05790237	23.2934	3454891559	DLH		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15							
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15=(14/5)*100 (Ki & Kr) Rp= 14							
1	2	3	4	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp	16						
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	215	2,300,000,000	165	269,111,750	195	295,000,000	65	129,811,298	10%	5,390,000							65.1	135201298	33.38461538	45.83094847	230.1	404313048	107.0232558	17.57882817	404313048	DLH		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akh	120	10,379,335,650	129	3,944,136,938	105	144,894,114				3,701,106							0.89	1,230,000	2.68									DLH
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani	60,500	16,117,096	0	-	60,500	16,117,096	48	1,280,000	77	3,150,000							12.566	4430000	20.770247	27.48634121	12566	4430000	20.770247	27.48634121	4430000	DLH		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12		15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14			
		melalui Pengangkutan	Melalui Proses Pengangkutan															93				93					
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah	Persentase Luas Layanan Pengumpulan Sampah	75.77	48,888,164	0	-	75.77	48,888,164	9.05	5,840,000	11.91	7,685,000					11.91	13525000	15.71862215	27.66518293	11.91	13525000	15.71862215	27.66518293	13525000	DLH
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Tertangani melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	100	75,490,925	0	-	100	75,490,925	3.22	2,430,000	4.66	3,520,000					4.66	5950000	4.66	7.88174277	4.66	5950000	4.66	7.88174277	5950000	DLH
					133,908,845,582		59,639,310,498		71,321,386,816																		
	Rata-Rata Capaian Kinerja Program																										

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				5		6		7		8		9	10		11		12		13		14			15									
				Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	I		II		III		IV		12=(8+9+10+11)		13=(12/7)*100		14=6+12			15= (14/5) *100 (Ki & Kr) Rp= 14								
1	2	3	4	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Ki	Rp	Kr	RP	Ki	Rp	Ki	Kr	Rp	16								
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																																
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan hidup dengan lembaga terkait; Terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan; Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan anggaran; SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang sudah terbangun dengan baik. 																													
	Faktor Penghambat Capaian Kinerja			<ol style="list-style-type: none"> Proses input Aplikasi SIRUP terkendala hingga baru selesai pada pertengahan Februari, selanjutnya terkendala operator pihak ketiga; Pada Sub Keg Rehab DAS Pelaksanaan Kegiatan tergantung proses review AMDAL yang baru selesai akhir Februari. Sehingga proses dokumen PPKH juga terhambat; Keterbatasan anggaran kas pada triwulan 1 sehingga menghambat realisasi dan capaian kinerja; Keterbatasan SDM dalam rangka pelaksanaan kegiatan; Proses pengadaan barang dan jasa melalui SPSE tidak sesuai rencana. 																													
	Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam triwulan berikutnya			<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi pada pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa; Memastikan jadwal pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai target; 																													
	Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD berikutnya			<ol style="list-style-type: none"> Menepati jadwal persiapan pengadaan Brrang Jasa agar memperlancar kegiatan; Menyesuaikan anggaran kas dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan taret kinerja; 																													

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah **"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"** dengan indikator tujuan **"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

- a. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
- b. Meningkatnya pengelolaan kebersihan; dan
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Adapun target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Target Tujuan dan Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	
			Sebelum	Sesudah
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,54	66,54

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target	
			Sebelum	Sesudah
2.	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	55,3	55,3
		Indeks Kualitas Udara	87,01	87,01
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83	47,83
3.	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82	82
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,4 (A)	80,4 (A)

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2024 guna menjawab atau mengantisipasi isu-isu Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian sumber mata air-sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Blitar dengan maksud melestarikan lingkungan hidup di kabupaten Blitar terhindar dari bahaya kekeringan;
2. Penghijauan disisi jalan (sepanjang jalan) dan Penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau dengan maksud untuk menciptakan keserasian dan keteduhan jalan dan juga untuk mengurangi dampak pemanasan global;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
4. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
5. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten, melalui pendekatan holistik. Dengan demikian, setiap usaha untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan, perlu didasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, keberlanjutan dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Keberlanjutannya merupakan tugas bersama dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dan bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk memperluas jangkauan kepedulian dan kesadaran lingkungan hidup perlu terus ditumbuhkan, agar dapat mengikat komitmen semua pihak yang terkait guna terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan panduan integrative untuk dapat secara nyata memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Blitar pada khususnya

3.1.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berikut disajikan dalam Tabel 3.2 mengenai indikator dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk Perubahan Renja PD Tahun 2024 :

Tabel 3.2 Indikator dan Target pada Perubahan Rencana Kerja 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Laju pertumbuhan retribusi daerah	10%	10%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	2 dokumen	2 dokumen
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	16 laporan	16 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	40 ASN	40 ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	4 laporan	4 laporan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	1 jenis
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	1 unit
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	64 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	6%	6%
- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	10%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35 dokumen	35 dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen
- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%
- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	50 laporan
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15%	15%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	12 %	0,05 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	1000 m2	-
- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,32 Ha	7,22 Ha
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2%	2%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang tertangani	48 ton	48 ton
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha / kegiatan yang terlayani penanganan Limbah B3	20 dokumen	20 dokumen
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	75%	75%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan/usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik	75%	75%
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	250 rekom	250 rekom
- Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	100 laporan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	10%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	60%	60%
- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	4 gerakan	4 gerakan
- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2400KK	3209 KK
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga/ masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas	42 lembaga	42 lembaga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
	dan kompetensinya terkait PPLH		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	5%
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	5 jenis	1 jenis
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	1 entitas
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	65%	65%
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20 dokumen	20 dokumen
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	82%	82%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	38,5%	38,5%
- Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	195 kelompok	195 kelompok
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasaran Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	105 unit	105 unit
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	60.500 ton	60.500 ton
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	75,77 %	75,77 %
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10 ton	10 ton

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Target	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100 ton	100 ton

3.2. Pendanaan

Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 24.648.367.721,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.110.000.000,- (4,67%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 23.538.367.721,-. Penambahan belanja tersebut dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2024 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar diarahkan pada:

1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya;
2. Penataan RTH dan Taman Kota ;
3. Peningkatan operasional pelayanan persampahan dan kebersihan di perkotaan;
4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Rehabilitasi DAS Brantas dan Penanaman pohon peneduh jalan), Gerakan Blitar Menanam.
6. Pengelolaan dan peningkatan Keanekaragaman Hayati melalui Taman Kehati.

7. Pencegahan Pencemaran Air Sungai melalui Getar Kasih dan Patroli Sungai.
8. Pembinaan Kampung Proklim.

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dijabarkan dalam 6 kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 1.914.084,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2 dokumen
 - Output Spesifik : Penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 2.232.210,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 5 dokumen
 - Output Spesifik : LKPJ, LPPD, LKjIP, SAKIP, RB
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%

- Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
- Kelompok Sasaran : Aparatur DLH

b. Kegiatan Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 4.449.903.961,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan; 40 ASN
 - Output Spesifik : Pelayanan gaji dan tunjangan untuk 40 ASN
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
- Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 21.720.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, 12 laporan
 - Output Spesifik : Pembayaran honorarium tim pengelola keuangan
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
- Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A

- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan indikator kinerja :
- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 4.774.558,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD; 4 dokumen
 - Output Spesifik : Penyusunan dokumen akuntansi pelaporan keuangan (laporan bulanan, tribulan semester, CALK)
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
- Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja :
- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 120.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal; 40 orang
 - Output Spesifik : Peningkatan kapasitas ASN bidang lingkungan hidup
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
- Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 2.155.953,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; 1 paket
 - Output Spesifik : Pengadaan lampu dan alat listrik
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp.68.801.944,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 1 paket
 - Output Spesifik : Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 36.560.514,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan; 1 paket
 - Output Spesifik : Cetak dan penggandaan dokumen
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 1.500.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan; 12 dokumen
 - Output Spesifik : Pengadaan koran
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 274.167.500,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 100 laporan
 - Output Spesifik :
 - Penyediaan biaya lumpsum, akomodasi dan transportasi perjalanan dinas

- Penyediaan mamin rapat dan sosialisasi
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 7.479.396,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; 10 unit
 - Output Spesifik : Jasa Perbaikan (servis) Peralatan Kerja
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 16.663.125,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 12 laporan
 - Output Spesifik : Pengadaan materai, register surat masuk dan keluar
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 119.655.282,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 12 laporan
 - Output Spesifik : Pembayaran rekening listrik, air, telepon
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 12.233.872,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 12 laporan
 - Output Spesifik : Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- dengan baik
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor , dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 2.898.557.890,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 laporan
 - Output Spesifik : Pembayaran Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor
 - Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
 - Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
 - Kelompok Sasaran : Aparatur DLH

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 1.432.101.759,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 64 unit

- Output Spesifik : - Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan uji kir Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan (servis) rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Hasil (*Benefit*) : - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah; 100%
- Laju pertumbuhan retribusi daerah; 10%
- Manfaat (*Outcomes*) : Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah; A
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya indeks kepuasan aparatur; 100%
- Kelompok Sasaran : Aparatur DLH

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 300.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Disusun; 1 dokumen
 - Output Spesifik : Penyusunan 1 Dokumen KLHS
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun; 5%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : DLH Kabupaten Blitar

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam 3 kegiatan :

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 95.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; 35 dokumen
 - Output Spesifik : - Pengujian 35 sampel air dan udara
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat, Pelaku Usaha
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 16.099.941,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, 1 dokumen
 - Output Spesifik : - Penyusunan 1 dokumen laporan IKPLHD
- Penyusunan 1 dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat desa Proklam di Kab. Blitar
 - Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 40.000.000,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun, 1 dokumen
- Output Spesifik : Penyusunan laporan IKPLHD, 1 dokumen
- Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
- Kelompok Sasaran : OPD

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 243.748.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan; 50 laporan
 - Output Spesifik :
 - Publikasi terkait informasi lingkungan hidup
 - Penyelenggaraan kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat

c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 480.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan; 3 dokumen
 - Output Spesifik :
 - 100 orang peserta Getar Kasih (Gerakan Terpadu Kali Bersih) yang dilaksanakan
 - Pembentukan 1 desa 1 Satgas Getar Kasih
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 9.175.560.237,-
 - Keluaran (*Output*) : luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; 10 Ha
 - Output Spesifik :
 - Jumlah bibit tanaman : 1 paket
 - Penugasan IPPKH JLS
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan; 47,83
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 742.552.900,-
- Keluaran (*Output*) : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota; 7,2 Ha
- Output Spesifik : Pemeliharaan taman kota dan RTH
Pembangunan toilet di RTH Wlingi
Pembangunan Taman di Instansi Pemerintah
Pemeliharaan paving di RTH Kanigoro
- Hasil (*Benefit*) : Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan; 0,05%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan; 47,83
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
- Kelompok Sasaran : Masyarakat, RTH dan Taman Kota di Kab. Blitar

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 24.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 20 dokumen
- Output Spesifik : Usaha / Kegiatan yang terlayani pengangkutan limbah B3

- Hasil (*Benefit*) : Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 17.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan; 250 rekom
 - Output Spesifik : 250 rekomendasi SPPLH dan UKL/UPL yang diterbitkan
 - Hasil (*Benefit*) : Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab; 75%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat, Pelaku Usaha
- Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 61.430.615,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi; 100 usaha / kegiatan
- Output Spesifik : 100 kali pengawasan pengelolaan limbah pada usaha/kegiatan yang dilakukan
- Hasil (*Benefit*) : Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab; 75%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air dan udara; 55,4 dan 87,01
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
- Kelompok Sasaran : Masyarakat, Pelaku Usaha

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 668.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah gerakan peduli lingkungan; 4 kegiatan
 - Output Spesifik : Pembinaan sekolah Adiwiyata
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan; 55,4 ;87,01 ; dan 47,83
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Sekolah Adiwiyata

- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 297.009.728,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat; 2400 keluarga
 - Output Spesifik : Peminaan Kampung Proklim
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan; 55,4 ;87,01 ; dan 47,83
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat, Desa Proklim

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja :
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 505.740.038,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH; 42 lembaga
 - Output Spesifik : Pembinaan Desa / Kelurahan BERSERI
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan; 10%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan; 55,4 ;87,01 ; dan 47,83
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
 - Kelompok Sasaran : Desa/Kelurahan BERSERI

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 10.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH; 1 entitas
- Output Spesifik : Lomba Fashion Show Daur Ulang
- Hasil (*Benefit*) : Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; 5%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan; 55,4 ;87,01 ; dan 47,83
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
- Kelompok Sasaran : Siswa Sekolah

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kotata, dengan sub kegiatan :

▪ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 25.250.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani; 20

- Output Spesifik : pengaduan
- 20 x tinjau lokasi pengaduan pencemaran lingkungan hidup
- Hasil (*Benefit*) : Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan; 100%
- Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kualitas air, udara dan tutupan lahan; 55,4 ;87,01 ; dan 47,83
- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 66,54
- Kelompok Sasaran : Masyarakat, Pelaku Usaha

10. Program Pengelolaan Persampahan, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II); Rp. 295.000.000,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat; 195 kelompok
 - Output Spesifik : - Pelatihan / pembinaan pengelolaan sampah
- SADE SAMPAH (Satu Desa Satu Bank Sampah)
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (APBD II & DAK); Rp. 2.102.261.552,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,

- Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir, 91 unit
- Output Spesifik : - Pengadaan kontainer sampah
- Pengadaan kendaraan roda 3
- Pengadaan armrol
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
 - Kelompok Sasaran : Masyarakat
- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana APBD II; Rp. 16.117.096,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan, 60.500 ton
 - Output Spesifik : Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA selama 1 tahun
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
 - Kelompok Sasaran : TPA, TPS, TPS 3R
 - Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana APBD II; Rp. 64.571.764,-
 - Keluaran (*Output*) : Persentase luas layanan pengumpulan sampah; 75,77%
 - Output Spesifik : Layanan Pembersihan tepi jalan perkotaan
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
 - Kelompok Sasaran : TPA, TPS, TPS 3R

- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana APBD II; Rp. 74.490.925,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, 10 ton
 - Output Spesifik : Pemilahan sampah di TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82
 - Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
 - Kelompok Sasaran : TPA, TPS, TPS 3R

- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, dengan indikator kinerja:
 - Masukan (*Input*) : Tersedianya dana APBD II; Rp. 75.490.925,-
 - Keluaran (*Output*) : Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, 100 ton
 - Output Spesifik : Pengolahan sampah di TPA
 - Hasil (*Benefit*) : Persentase sampah yang terkelola; 82%
 - Manfaat (*Outcomes*) : Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan; 82

- Dampak (*Impact*) : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 66,54
- Kelompok Sasaran : TPA, TPS, TPS 3R

Rencana tersebut dapat berjalan baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan yang memiliki sikap dan mental profesionalisme, partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan sebuah tujuan.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	DLH Kab. Blitar	A	A	10.615.742.629	9.470.422.048	APBD II		A	5.970.429.031
		Laju pertumbuhan retribusi daerah		10%	10%					10%	
2.11.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	DLH Kab. Blitar	4 dokumen	4 dokumen	4.146.294	4.146.294	APBD II		4 dokumen	18.500.000
2.11.01.2.0 1.01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab. Blitar	2 dokumen	2 dokumen	1.914.084	1.914.084	APBD II		2 dokumen	12.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 1.07	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH Kab. Blitar	5 laporan	5 laporan	2.232.210	2.232.210	APBD II		5 laporan	6.500.000
2.11.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	DLH Kab. Blitar	16 laporan	16 laporan	4.762.758.552	4.476.398.519	APBD II		16 laporan	4.704.543.661
2.11.01.2.0 2.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	DLH Kab. Blitar	40 ASN	40 ASN	4.732.163.907	4.732.163.907	APBD II		34 ASN	4.611.543.661,
2.11.01.2.0 2.03	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH Kab. Blitar	12 laporan	12 laporan	21.360.000	21.720.000	APBD II		12 laporan	82.200.000
2.11.01.2.0 2.04	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	DLH Kab. Blitar	4 laporan	4 laporan	9.234.645	4.774.558	APBD II		4 laporan	10.800.000
2.11.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH Kab. Blitar	40 orang	40 orang	120.000.000	120.000.000	APBD II		34 orang	550.000.000
2.11.01.2.0 5.08	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	DLH Kab. Blitar	40 orang	40 orang	120.000.000	120.000.000	APBD II		34 orang	550.000.000
2.11.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	DLH Kab. Blitar	12 bulan	12 bulan	319.766.711	383.185.911	APBD II		12 bulan	154.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.0 6.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	1 paket	1 paket	2.155.953	2.155.953	APBD II		1 paket	3.000.000
2.11.01.2.0 6.02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	1 paket	1 paket	67.632.744	68.801.944	APBD II		1 paket	35.000.000
2.11.01.2.0 6.05	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	1 paket	1 paket	36.560.514	36.560.514	APBD II		1 paket	20.000.000
2.11.01.2.0 6.06	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	12 dokumen	12 dokumen	1.500.000	1.500.000	APBD II		12 dokumen	1.800.000
2.11.01.2.0 6.09	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab. Blitar	100 laporan	100 laporan	211.917.500	274.167.500	APBD II		100 laporan	65.000.000
2.11.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	DLH Kab. Blitar	4 jenis	1 jenis	874.081.82	7.479.396	APBD II		4 jenis	64.980.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.11.01.2.0 7.06	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	10 unit	1 unit	874.081.82	7.479.396	APBD II		10 unit	64.980.000
2.11.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH Kab. Blitar	12 bulan	12 bulan	3.038.149.986	3.047.110.169	APBD II		12 bulan	352.685.370,
2.11.01.2.0 8.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab. Blitar	12 laporan	12 laporan	16.663.125	16.663.125	APBD II		12 laporan	19.690.000
2.11.01.2.0 8.02	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	12 laporan	12 laporan	119.655.282	119.655.282	APBD II		12 laporan	89.998.570
2.11.01.2.0 8.03	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	12 laporan	12 laporan	9.056.379	12.233.872	APBD II		12 laporan	14.996.800
2.11.01.2.0 8.04	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLH Kab. Blitar	12 laporan	12 laporan	2.892.775.200	2.898.557.890	APBD II		12 laporan	228.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DLH Kab. Blitar	12 bulan	12 bulan	1.496.839.265	1.432.101.759	APBD II		12 bulan	124.920.000
2.11.01.2.09.02	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLH Kab. Blitar	64 unit	64 unit	1.446.842.465	1.432.101.759	APBD II		64 unit	119.920.000
2.11.01.2.09.09	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	DLH Kab. Blitar	1 unit	1 unit	49.996.800,	-	APBD II		1 unit	5.000.000
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	DLH Kab. Blitar	5%	5%	300.000.000	300.000.000	APBD II		5%	250.000.000
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	DLH Kab. Blitar	6%	6%	300.000.000	300.000.000	APBD II		6%	250.000.000
2.11.02.2.02.02	- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	DLH Kab. Blitar	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	300.000.000	APBD II		1 dokumen	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Blitar	10%	10%	10.259.364.773	9.808.412.140,	APBD II		10%	1.919.220.418
2.11.03.2.0 1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Blitar	5%	5%	162.173.472	174.173.408	APBD II		5%	450.000.000
2.11.03.2.0 1.01	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH Kab. Blitar	1 dokumen	1 dokumen	95.000.000	95.000.000	APBD II		1 dokumen	250.000.000
2.11.03.2.0 1.02	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	DLH Kab. Blitar	1 dokumen	1 dokumen	16.100.000	16.099.941	APBD II		1 dokumen	100.000.000
2.11.03.2.0 1.11	- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	DLH Kab. Blitar	1 dokumen	1 dokumen	51.073.472	63.073.467	APBD II		1 dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.0 2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Blitar	5%	5%	70.325.115	70.325.115	APBD II		5%	250.000.000
2.11.03.2.0 2.01	- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	DLH Kab. Blitar	50 laporan	50 laporan	70.325.115	70.325.115	APBD II		50 laporan	250.000.000
2.11.03.2.0 3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Blitar	15%	15%	10.026.866.186	9.563.913.617	APBD II		15%	1.219.220.41
2.11.03.2.0 3.01	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	DLH Kab. Blitar	3 dokumen	3 dokumen	383.353.426	388.353.380	APBD II	-	3 dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.0 3.09	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	DLH Kab. Blitar	10 Ha	10 Ha	9.643.512.760	9.175.560.237	APBD II	-	50 dokumen	1.069.220.418
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	DLH Kab. Blitar	12 %	0,05 %	459.543.226	742.552.900	APBD II		16 %	5.522.912.283
2.11.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	DLH Kab. Blitar	1000 m2	-	459.543.226	742.552.900	APBD II		1000 m2	5.522.912.283
2.11.04.2.0 1.04	- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	DLH Kab. Blitar	7,2 Ha	7,2 Ha	459.543.226	742.552.900	APBD II		7,3 Ha	5.522.912.283
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DLH Kab. Blitar	2%	2%	24.000.000	24.000.000	APBD II		3%	2.846.608.428
2.11.05.2.0 1	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang tertangani	DLH Kab. Blitar	48 ton	48 ton	24.000.000	24.000.000	APBD II		36 ton	2.846.608.428,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.05.2.0 1.04	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DLH Kab. Blitar	20 dokumen	20 dokumen	24.000.000	24.000.000	APBD II		20 dokumen	2.846.608.428,
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	DLH Kab. Blitar	75%	75%	78.430.615	78.430.615	APBD II		80%	300.000.000
2.11.06.2.0 1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan/usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik	DLH Kab. Blitar	75%	75%	78.430.615	78.430.615	APBD II		80%	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.06.2.0 1.01	- Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	DLH Kab. Blitar	250 rekom	250 rekom	17.000.000	17.000.000	APBD II		250 rekom	175.000.000
2.11.06.2.0 1.09	- Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	DLH Kab. Blitar	100 usaha / kegiatan	100 usaha / kegiatan	61.430.615	61.430.615	APBD		100 usaha / kegiatan	125.000.000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	DLH Kab. Blitar	10%	10%	1.390.229.445	1.558.182.001	APBD II		10%	525.000.000
2.11.08.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat	DLH Kab. Blitar	60%	60%	1.390.229.445	1.558.182.001	APBD II		60%	525.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pengetahuannya									
2.11.08.2.0 1.02	- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	DLH Kab. Blitar	4 gerakan	4 gerakan	668.000.000	755.432.235	APBD II		4 gerakan	145.000.000
2.11.08.2.0 1.02	- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	DLH Kab. Blitar	2400 keluarga	2400 keluarga	232.229.445	297.009.728	APBD II		2400 keluarga	150.000.000
2.11.08.2.0 1.05	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	DLH Kab. Blitar	42 lembaga	42 lembaga	490.000.000	505.740.038	APBD II		42 lembaga	230.000.000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	DLH Kab. Blitar	5%	5%	12.678.932	12.678.932	APBD II		5%	450.000.000
2.11.09.2.0 1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan	DLH Kab. Blitar	5 jenis	1 jenis	12.678.932	12.678.932	APBD II		5 jenis	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		lingkungan									
2.11.09.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarkat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	DLH Kab. Blitar	5 entitas	1 entitas	12.678.932	12.678.932	APBD II		5 etintas	450.000.000
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	DLH Kab. Blitar	60%	60%	25.250.000	25.250.000	APBD II		65%	50.000.000
2.11.10.2.0 1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	DLH Kab. Blitar	100%	100%	25.250.000	25.250.000	APBD II		100%	50.000.000
2.11.10.2.0 1.02	- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	DLH Kab. Blitar	20 pengaduan	20 pengaduan	25.250.000	25.250.000	APBD II		20 dokumen	50.000.000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang	DLH Kab.	82%	82%	655.388.047	2.628.439.085	APBD II & DBHCHT		82%	6.500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terkelola	Blitar								
2.11.11.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	DLH Kab. Blitar	38,5%	38,5%	655.388.047	2.628.439.085	APBD II		39%	6.500.000.000
2.11.11.2.0 1.04	- Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	DLH Kab. Blitar	195 unit	195 unit	295.000.000	295.000.000	APBD II		200 unit	400.000.000
2.11.11.2.0 1.07	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasaran Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhi	DLH Kab. Blitar	105 unit	105 unit	144.894.114	2.102.261.552	APBD II, DBHCHT		110 unit	1.700.000.000
2.11.11.2.0 1.12	- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	DLH Kab. Blitar	60.500 ton	60.500 ton	16.117.096	16.117.096	APBD II		61.000 ton	2.600.000.000,
2.11.11.2.0 1.16	- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	DLH Kab. Blitar	75,77%	75,77%	48.888.164	64.571.764	APBD II		76%	1.000.000.000
2.11.11.2.0 1.17	- Sub Kegiatan Penanganan sampah	Jumlah sampah yang tertangani	DLH Kab. Blitar	10 ton	10 ton	74.997.748	74.997.748	APBD II		10 ton	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Output Spesifik	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
2.11.11.2.0 1.20	- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH Kab. Blitar	100 ton	100 ton	75.490.925	75.490.925	APBD II		5000 ton	600.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup. Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun-tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Blitar, 26 Agustus 2024


**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLITAR**
ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700725 199003 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BLITAR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.472.191.000,00	23.820.627.667,00	24.648.367.721,00	12.176.176.721,00							24.334.170.160,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							12.472.191.000,00	23.820.627.667,00	24.648.367.721,00	12.176.176.721,00							24.334.170.160,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah				-	100 %	5.447.285.610,00	10.615.742.629,00	9.470.422.048,00	523.143.421,00							5.970.429.031,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan				-	4 dokumen	11.605.000,00	4.146.294,00	4.146.294,00	-7.458.706,00							18.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.430.000,00	1.914.084,00	1.914.084,00	-4.515.916,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.175.000,00	2.232.210,00	2.232.210,00	-2.942.790,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu				-	16 laporan	4.515.125.000,00	4.762.758.552,00	4.476.398.519,00	-38.726.481,00							4.704.543.661,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.482.240.000,00	4.732.163.907,00	4.449.903.961,00	-32.336.039,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			4.611.543.661,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	24.760.000,00	21.360.000,00	21.720.000,00	-3.040.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			82.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8.125.000,00	9.234.645,00	4.774.558,00	-3.350.442,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			10.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	40 orang	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel				-	12 bulan	288.179.028,00	319.766.711,00	383.185.911,00	95.006.883,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			154.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.155.953,00	2.155.953,00	-3.844.047,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	57.000.000,00	67.632.744,00	68.801.944,00	11.801.944,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	70.706.943,00	0,00	0,00	-70.706.943,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	36.560.514,00	36.560.514,00	8.560.514,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-900.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			1.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				100 Laporan	100 Laporan	124.072.085,00	211.917.500,00	274.167.500,00	150.095.415,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	4 jenis	28.000.000,00	874.081.821,00	7.479.396,00	-20.520.604,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			64.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	28.000.000,00	874.081.821,00	7.479.396,00	-20.520.604,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			14.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	396.606.524,00	3.038.149.986,00	3.047.110.169,00	2.650.503.645,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			352.685.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.660.000,00	16.663.125,00	16.663.125,00	4.003.125,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			19.690.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.158.000,00	119.655.282,00	119.655.282,00	14.497.282,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			89.998.570,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	9.056.379,00	12.233.872,00	-2.766.128,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			14.996.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263.788.524,00	2.892.775.200,00	2.898.557.890,00	2.634.769.366,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			228.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	207.770.058,00	1.496.839.265,00	1.432.101.759,00	1.224.331.701,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			124.920.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	64 Unit	167.666.126,00	1.446.842.465,00	1.432.101.759,00	1.264.435.633,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			119.920.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.103.932,00	49.996.800,00	0,00	-40.103.932,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun				-	5 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-50.000.000,00							250.000.000,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun				-	6 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup				-	10 %	803.636.490,00	10.259.364.773,00	9.808.412.140,00	1.115.583.928,00							1.919.220.418,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				-	5 %	155.000.000,00	162.173.472,00	174.173.408,00	19.173.408,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				35 Dokumen	35 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	16.100.000,00	16.099.941,00	-3.900.059,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	51.073.472,00	63.073.467,00	23.073.467,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				-	5 %	75.000.000,00	70.325.115,00	70.325.115,00	-4.674.885,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				50 Laporan	50 Laporan	75.000.000,00	70.325.115,00	70.325.115,00	-4.674.885,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				-	15 %	573.636.490,00	10.026.866.186,00	9.563.913.617,00	8.990.277.127,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			1.219.220.418,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	73.636.490,00	383.353.426,00	388.353.380,00	314.716.890,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				10 Ha	10 Ha	500.000.000,00	9.643.512.760,00	9.175.560.237,00	8.675.560.237,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			1.069.220.418,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan				-	0,05 %	1.231.600.000,00	459.543.226,00	742.552.900,00	4.291.312.283,00							5.522.912.283,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau				-	0 Ha	1.231.600.000,00	459.543.226,00	742.552.900,00	-489.047.100,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			5.522.912.283,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1.588 Ha	7,2 Ha	1.231.600.000,00	459.543.226,00	742.552.900,00	-489.047.100,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			5.522.912.283,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)				-	2 %	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	2.826.608.428,00							2.846.608.428,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang tertangani				-	48 ton	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			2.846.608.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persejuaan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			2.846.608.428,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab				-	75 %	157.260.000,00	78.430.615,00	78.430.615,00	142.740.000,00							300.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan/Usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik				-	75 %	157.260.000,00	78.430.615,00	78.430.615,00	-78.829.385,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				250 Dokumen	250 Dokumen	50.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-33.000.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	107.260.000,00	61.430.615,00	61.430.615,00	-45.829.385,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan				-	10 %	128.729.445,00	1.390.229.445,00	1.558.182.001,00	396.270.555,00							525.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya				-	60 %	128.729.445,00	1.390.229.445,00	1.558.182.001,00	1.429.452.556,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Bertubaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	668.000.000,00	755.432.235,00	725.432.235,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				2400 Keluarga	2400 Keluarga	43.729.445,00	232.229.445,00	297.009.728,00	253.280.283,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				42 Lembaga	42 Lembaga	55.000.000,00	490.000.000,00	505.740.038,00	450.740.038,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup				-	5 %	15.000.000,00	12.678.932,00	12.678.932,00	435.000.000,00							450.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten				-	5 jenis	15.000.000,00	12.678.932,00	12.678.932,00	-2.321.068,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	1 Entitas	15.000.000,00	12.678.932,00	12.678.932,00	-2.321.068,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan				-	65 %	25.000.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	25.000.000,00							50.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti				-	100 %	25.000.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	250.000,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				20 Pengaduan	20 Pengaduan	25.000.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	250.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola				-	82 %	4.343.679.455,00	655.388.047,00	2.628.439.085,00	2.156.320.545,00							6.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani				-	38,5 %	4.343.679.455,00	655.388.047,00	2.628.439.085,00	-1.715.240.370,00			-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			6.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				195 Kelompok	195 Kelompok	410.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				105 Unit	105 Unit	1.144.910.000,00	144.894.114,00	2.102.261.552,00	957.351.552,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				60500 Ton	60500 Ton	839.419.456,00	16.117.096,00	16.117.096,00	-823.302.360,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			2.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				75.77 Persentase	75.77 Persentase	1.133.400.951,00	48.888.164,00	64.571.764,00	-1.068.829.187,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>				10 Ton	10 Ton	40.850.000,00	74.997.748,00	74.997.748,00	34.147.748,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																				
			<i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				100 Ton	100 Ton	775.099.048,00	75.490.925,00	75.490.925,00	-699.608.123,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana PP-3 Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sektor-sektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
J U M L A H									12.472.191.000,00	23.820.627.667,00	24.648.367.721,00	12.176.176.721,00							24.334.170.160,00			